

PARTAI POLITIK

OLEH:

ADIYANA SLAMET

Definisi Partai Politik

Secara umum dapat dikatakan partai politik adalah “suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama”. Tujuan kelompok ini untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Carl J. Friedrich, partai politik adalah “seklompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya dan, berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan bersifat idiil ataupun materil”. lebih lanjut dikatakan oleh **R.H. Soltau**, “partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih , bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka,” dalam Budiardjo (1998: 161)

Fungsi Partai Politik

Fungsi utama partai politik menurut **Surbakti** (1992:116-121), ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. selain fungsi utama partai politik, maka partai politik juga mempunyai fungsi:

1. Sosialisasi politik

proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat, dari segi metode penyampaian pesan sosialisasi politik dibagi dua:

- a). Pendidikan politik: merupakan proses dialogis pemberi dan penerima pesan, melalui proses ini masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik.
- b) Indoktrinasi politik: proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima, nilai, norma dan simbol yang dianggap pihak yang berkuasa sebagai ideal dan baik.

2. Rekrutmen politik
Seleksi dan pemilihan atau seleksi atau pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.
3. Partisipasi politik
sebagai perhatian dari warga negara yang berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingannya terhadap pejabat publik
4. Pemandu kepentingan
dalam masyarakat terdapat sejumlah kepentingan, untuk menampung dan memandu kepentingan-kepentingan tersebut maka partai politik dibentuk
5. Komunikasi politik
Komunikasi politik merupakan aktivitas pesan orang-orang yang melakukan kegiatan politik, dalam bentuk mempengaruhi dan menstimulus orang lain untuk melakukan kegiatan politik, baik pada tingkatan hubungan antar suprastruktur dan infrastruktur.
6. Pengendali konflik dan,
partai politik merupakan salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan kedalam badan perwakilan untuk dimusyawarahkan untuk diselesaikan dan mendapatkan keputusan politik .
7. Kontrol politik

Namun lebih lanjut dikatakan Budiardjo (1998:163), dalam negara demokratis partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi:

1. Partai sebagai sarana komunikasi politik
2. Partai sebagai sarana sosialisasi politik
3. Partai sebagai sarana rekrutmen politik
4. Partai sebagai sarana pengatur konflik

Klasifikasi Partai Politik

Klasifikasi partai dapat dilakukan dengan berbagai cara, bila dilihat dari **komposisi jumlah dan keanggotaannya**, secara umum dapat dibagi kedalam dua jenis yaitu:

1. Partai Massa

partai massa mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota

2. Partai Kader

partai jenis ini mementingkan ketaatan organisasi dan disiplin kerja anggota-anggotanya. Pimpinan partai biasanya menjaga kemurnian doktrin politik yang dianut dengan jalan mengadakan saringan terhadap anggotanya dan memecat anggota yang menyeleweng dari garis partai yang telah ditetapkan.

kalsifikasi lainnya dapat dilihat dari segi **sifat dan orientasinya**, dalam hal ini partai-partai dapat dikualifikasikan kedalam dua jenis, yaitu:

1. Partai Lindungan

partai lindungan umumnya memiliki organisasi yang kendor, disiplin yang lemah, maksud utama partai ini memenangkan Pemilu untuk anggota-anggotanya sehingga hanya giat menjelang pemilu saja

2. Partai Ideologi atau partai Azas

biasanya mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijakan pimpinan dan berpedoman pada disiplin partai yang kuat dan mengikat.

dari kedua pandangan klasifikasi partai diatas terdapat klasifikasi partai lagi yang diyakini menjawab ketidak puasan para ilmuan politik, pandangan klasifikasi yang lain dikemukakan oleh Maurice Duverger dalam bukunya yang terkenal *Political Parties*, yaitu:

1. Sistem Partai Tunggal
2. Sistem Dwi Partai dan,
3. Sistem Multi Partai (Budiardjo, 1998:166-170)

Partai-Partai Politik di Indonesia

Dalam perspektif Larry Diamond, konsolidasi demokrasi mencakup pencapaian tiga agenda besar, yakni :

- (1) kinerja atau *performance* ekonomi dan politik dari rejim demokratis;
- (2) ***institusionalisasi politik (penguatan birokrasi, partai politik, parlemen, pemilu, akuntabilitas horizontal, dan penegakan hukum)***; dan
- (3) restrukturisasi hubungan sipil-militer yang menjamin adanya kontrol otoritas sipil atas militer di satu pihak dan terbentuknya *civil society* yang otonom di lain pihak.

Mengapa kinerja partai-partai cenderung buruk? Dalam kaitan ini **Arbi sanit** dalam Mahrus Irsyam dan Lili Romli, “Perubahan Mendasar Partai Politik”, dalam Mahrus Irsyam dan Lili Romli, ed., *Menggugat Partai Politik* (2003:1-34) mengidentifikasi empat kelompok kegagalan partai-partai, yaitu **“kegagalan organisasi dan institusi, kegagalan kepemimpinan, kegagalan ideologi, serta kegagalan taktik dan strategi”**. **Kegagalan organisasi dan institusionalisasi** tampaknya dialami oleh hampir semua partai politik. Konflik internal partai misalnya yang dialami oleh partai-partai besar pada umumnya bersumber pada pelanggaran “aturan main” yang ironisnya sebagian besar dilakukan pemimpin atau ketua umum partainya masing-masing. Tidak ada tradisi berorganisasi secara rasional, kolegal, demokratis, dan bertanggung jawab di dalam partai-partai karena tidak jarang keputusan dan pilihan politik ditentukan secara sepihak dan oligarkis oleh segelintir atau bahkan seorang pemimpin partai

Kegagalan kepemimpinan dapat dilihat dari tiga unsur, yaitu orientasi sikap dan tingkah laku, kematangan etis, dan kualifikasi serta kemampuan elite partai dalam *performance* politik mereka. Penolakan para pemimpin partai untuk melepaskan jabatan rangkap mereka merupakan indikasi bagi kualitas sikap dan perilaku yang rendah pula. Begitu juga dengan kecenderungan para elite partai meraih dukungan dengan memanipulasi identitas kultural dan primordial, jelas merupakan contoh lain dari kegagalan kepemimpinan di kalangan partai. Para pemimpin partai mestinya mendidik rakyat supaya mendukung mereka secara rasional berdasarkan prinsip pertukaran dukungan (yang diberikan rakyat) dengan pelayanan publik (yang diberikan elite sebagai kompensasinya).

Sementara itu dalam **konteks ideologi**, para politisi partai cenderung bersifat mendua dan tidak konsisten. Di satu pihak secara formal dan verbal mendukung ideologi, baik ideologi negara, ideologi partai, maupun ideologi yang bersifat universal, tetapi dalam perilaku seringkali menggunakan dukungan itu untuk kepentingan kekuasaan belaka. Kepentingan kelangsungan kekuasaan pribadi dan *vested interest* kelompok akhirnya mengalahkan komitmen mereka terhadap ideologi. Pada akhirnya, kepentingan pribadi dan kelompok itulah yang menjadi “ideologi” para politisi partai kita dewasa ini. Sementara itu dalam **konteks taktik dan strategi**, pada umumnya partai-partai terperangkap upaya memperjuangkan jabatan jabatan-jabatan publik ketimbang perjuangan memenangkan kebijakan publik, sehingga tidak mengherankan jika citra publik partai-partai era reformasi, seperti dicerminkan banyak hasil survei dan *polling*, begitu buruk.

Sebagai organisasi moderen, partai-partai tentu dituntut untuk mengembangkan etika berpartai secara moderen pula. Termasuk di dalamnya etika kepemimpinan yang demokratis dan kolegal, etika berorganisasi atas dasar distribusi kekuasaan yang terdiferensiasi, dan etika pertanggungjawaban secara publik, yang semuanya dilembagakan melalui mekanisme internal partai yang disepakati bersama. Melalui pelembagaan etika berpartai semacam itu, partai-partai tidak hanya diharapkan menjadi wadah pendidikan politik dan pembentukan kepemimpinan, tetapi juga bisa menjadi basis sekaligus pondasi bagi pelembagaan demokrasi pada tingkat nasional